

PREFERENSI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI: STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BOGOR

(Stakeholders' Preferences on Production Forest Management: A Case Study in Forest District of Bogor)

Oleh / By :

Triyono Puspitojati¹, Dudung Darusman², Rudy C. Tarumingkeng³ & Boen Purnama⁴

¹Balai Penelitian Teknologi Agroforestri, Jl. Ciamis Banjar Km 4 PO BOX 5 Ciamis 46201,

Telp. (0265) 771352, E-mail: tp_jati@yahoo.co.id

²Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga-Bogor

³Universitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat 11470

⁴Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

Diterima 6 Maret 2012, disetujui 24 Mei 2012

ABSTRACT

*Forest management systems formulated by forest concession firm in Java was not suitable to manage production forest sustainably. This study tried to formulate production forest management system based on 9 (nine) groups of stakeholders' preferences. The objectives of this study were (1) to find out preferences of stakeholders on production forest management and (2) to formulate the production forest management system matching with stakeholders' preferences. The results of this study were as follows. **First**, the stakeholders' preferences were: (1) rural people participate on production forest management activities. This can be brought into reality by placing empowerment as part of production forest management activities; (2) Rural people had a job continuously on production forest management. This can be brought into reality by managing production forest multiculturally which products can be harvested yearly; and (3) Rural people participate on activities related to production forest management. This can be brought into reality by subjected them as the partner of forest concession firm on private forest management, forestry production inputs and forest products industries. **Second**, the production forest management system matching with stakeholders' preferences was multiculture production forest management system based on rural people empowerment which subjected rural people as the partner of forest concession firm on forest management, forest products industries and forestry production inputs.*

Keywords: Preference, stakeholder, production forest, management

ABSTRAK

Pola pengelolaan hutan produksi yang dirumuskan oleh pengelola hutan di Jawa tidak sesuai digunakan sebagai landasan pengelolaan hutan produksi yang lestari. Penelitian ini berupaya merumuskan pola pengelolaan hutan produksi berdasarkan preferensi 9 (sembilan) kelompok pemangku kepentingan. Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi dan (2) merumuskan pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. **Pertama**, preferensi pemangku kepentingan adalah: (1) masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan produksi.

Hal ini dapat diwujudkan dengan memasukkan pemberdayaan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan; (2) masyarakat pedesaan memperoleh pekerjaan secara berkelanjutan dalam pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengelola hutan produksi secara multikultur yang hasilnya dapat dipanen setiap tahun; dan (3) Masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan menempatkan mereka sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam pengelolaan hutan rakyat, usaha penyediaan input produksi dan industri hasil hutan. **Kedua**, pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan adalah pola pengelolaan hutan produksi multikultur/agroforestri berbasis pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam kegiatan pengelolaan hutan, penyedia *input* produksi dan industri hasil hutan.

Kata kunci: Preferensi, pemangku kepentingan, pengelolaan, hutan produksi

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan produksi di Jawa sampai awal tahun 1970-an dilakukan secara konvensional dengan prinsip kelestarian hasil. Sejak tahun 1960-an, sistem pengelolaan hutan yang kurang melibatkan masyarakat sekitar hutan tersebut tidak lagi memadai untuk mengelola hutan secara lestari. Masyarakat pedesaan yang berpendapatan rendah, tidak memiliki pekerjaan atau lahan dan kurang memperoleh manfaat dari hutan yang ada di sekitar tempat tinggalnya, melakukan berbagai gangguan hutan seperti penjarahan lahan, pencurian kayu, perencekan dan pengembalaan liar (Simon, 1994; Setyarso, 1995).

Upaya mengatasi masalah tersebut telah dilakukan oleh Perum Perhutani sejak tahun 1971 dengan merubah paradigma pengelolaan hutan dari pengaturan hasil (*timber based management*) yang mementingkan kelestarian produksi kayu menjadi pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat (*community based forest management*) yang mementingkan kelestarian fungsi dan manfaat hutan untuk masyarakat. Sistem pengelolaan hutan yang didasarkan pada pendekatan sosial ekonomi atau pendekatan perhutanan sosial ini dilakukan melalui beragam program atau pola, yaitu: Pendekatan Kesejahteraan (*prosperity approach*) yang dilaksanakan tahun 1971 - 1982,

Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (1982 - 1985), Perhutanan Sosial (1986 - 1995), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (1996 - 1999) dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Dengan Masyarakat (2000 - sekarang). Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat masing-masing pola pengelolaan hutan tersebut berbeda, mulai dari terbatas sampai luas (Perum Perhutani, 2001; Perum Perhutani, 2007).

Beragam pola pengelolaan hutan tersebut dirumuskan oleh perusahaan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dalam implementasinya, perusahaan menghadapi masalah yang sama, yaitu: gangguan hutan terus terjadi, manfaat hutan bagi masyarakat tetap rendah (Perum Perhutani KPH Bogor, 2006) dan dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan hutan tetap terbatas (Pemerintah Kabupaten Bogor, 2007). Oleh karena itu, pola pengelolaan hutan tersebut perlu dirumuskan kembali sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan menanyakan langsung kepada para pemangku kepentingan. Keterlibatan mereka dalam penentuan kegiatan (pengelolaan hutan produksi) dapat meningkatkan keberhasilan implementasinya (Birkland, 1984; Suharto, 2006; Widodo, 2007;

Brinkerhorff dan Crossby, 2002; Muller, 1982).

Penelitian ini dilakukan mengingat implementasi beragam pola pengelolaan hutan yang dirumuskan oleh perusahaan belum berhasil mengatasi gangguan hutan dan belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan. Maksud penelitian adalah menggali berbagai informasi yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi berdasarkan preferensi 9 (sembilan) kelompok pemangku kepentingan. Tujuannya adalah (1) mengetahui preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi dan (2) merumuskan pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran

Preferensi seseorang dalam menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia ditunjukkan dengan menyusun urutan alternatif tersebut, mulai dari alternatif yang paling disukai sampai dengan alternatif yang paling tidak disukai. Menurut Robbins (2002), seseorang dapat menentukan preferensinya secara rasional apabila: (a) memiliki informasi yang lengkap tentang situasi yang dihadapi, (b) mampu menyusun daftar alternatif pemecahan masalah dan memiliki semua kriteria yang relevan untuk menilai konsekuensi dari setiap alternatif, (c) mampu menentukan nilai penting dari setiap kriteria dan menyusun alternatif pemecahan masalah dan (d) mampu memilih alternatif yang menghasilkan nilai tertinggi.

Dalam menghadapi masalah yang sederhana, seseorang dapat dengan mudah menentukan preferensinya secara rasional. Dalam menghadapi masalah yang kompleks atau informasi yang dimiliki terbatas, menurut Robbins, seseorang hanya dapat berupaya bertindak rasional dengan cara menyederhanakan masalah. Penyusunan daftar kriteria dan alternatif hanya dilakukan pada kriteria dan alternatif yang sudah dikenal. Selanjutnya, penentuan preferensi dilakukan terhadap alternatif yang dianggap terbaik, paling tidak untuk dirinya sendiri.

Masalah atau persoalan pengelolaan hutan produksi dan pemberdayaan masyarakat adalah kompleks. Sementara itu, informasi tentang persoalan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang dimiliki para pemangku kepentingan beragam, dan sebagian individu atau kelompok pemangku kepentingan diperkirakan hanya memiliki informasi terbatas. Dalam kondisi yang demikian, sebagian pemangku kepentingan dapat diharapkan tidak dapat menentukan preferensinya secara rasional. Oleh karena itu, persoalan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat yang kompleks perlu dipilah menjadi banyak masalah yang sederhana.

Dalam penelitian ini, persoalan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat dipilah menjadi 4 (empat) kelompok persoalan (lihat Tabel 1), 14 sub-kelompok persoalan yang lebih sederhana dan 51 persoalan yang sederhana. Selanjutnya, disusun 14 kelompok pertanyaan tertutup atau 51 pertanyaan tertutup tentang preferensi pemangku kepentingan (PK) dalam pengelolaan hutan produksi dan tentang persepsi PK terhadap kemampuan masyarakat pedesaan, pemda dan perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi.

Tabel 1. Persoalan pengelolaan hutan dan pertimbangan dalam menentukan preferensi
Table 1. The issue of forest management and consideration in deciding preferences

Persoalan pengelolaan hutan (<i>Issue of forest management</i>)	Pertimbangan (<i>Consideration</i>)
1. Peran perusahaan/ ruang lingkup pengelolaan hutan (<i>Role of firm/ range of forest management</i>) - pengelolaan dengan pemberdayaan (<i>forest management with empowerment</i>) - pengelolaan tanpa pemberdayaan (<i>forest management without empowerment</i>)	Manfaat hutan, partisipasi masyarakat dan kelestarian hutan
2. Prioritas pemberdayaan (<i>Priority of empowerment</i>) - kegiatan pengelolaan dan yang terkait (<i>forest management and related activities</i>) - kegiatan lain (<i>other activities</i>)	Kesempatan kerja, pendapatan, partisipasi masyarakat, dampak ganda pemberdayaan, ketersediaan sumberdaya dan kelestarian hutan
3. Peran pemerintah (<i>Role of government</i>) - pemberdayaan masyarakat (<i>rural people empowerment</i>) - penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) - menyeimbangkan permintaan penawaran kayu (<i>balancing supply and demand of wood</i>)	Kemampuan sumberdaya, tingkat gangguan dan tingkat dukungan yang diharapkan
4. Peran masyarakat (<i>Role of rural people</i>) - sebagai pengelola (<i>as a manager</i>) - sebagai pekerja (<i>as a worker</i>) - penerima manfaat pembangunan (<i>receive the results of development</i>)	Kemampuan masyarakat, kemampuan pemda dan perusahaan memberdayakan masyarakat

Setiap kelompok pertanyaan tentang preferensi terdiri dari 2 (dua) sampai 6 (enam) pertanyaan yang sama dan mempunyai alternatif jawaban yang sama, namun masing-masing pertanyaan diajukan dengan pertimbangan yang berbeda. Sementara itu, setiap pertanyaan tentang persepsi mempunyai 2 (dua) alternatif jawaban yang menggambarkan dua kondisi yang saling bertentangan (mampu dan tidak mampu, memadai dan tidak memadai, atau optimal dan tidak optimal). Melalui pertanyaan-pertanyaan tertutup tersebut, semua responden dari 9 (sembilan) kelompok PK diharapkan dapat menentukan preferensinya secara rasional.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah KPH Bogor dan kantor/tempat di mana pemangku kepentingan melaksanakan kegiatannya, pada bulan Juli - September 2006. Lokasi ini dipilih karena KPH Bogor menghadapi gangguan hutan yang serius dan lokasi hutan relatif dekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja semua kelompok pemangku kepentingan yang ada di pusat dan daerah sehingga pengumpulan data lebih mudah dilakukan.

C. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah 9 (sembilan) kelompok pemangku kepentingan (PK) hutan produksi yang melakukan kegiatannya

di berbagai kantor dan tempat, yaitu: (1) Pegawai Kemenhut (4 Eselon I Jakarta), (2) Pegawai Perhutani yang bekerja di kantor (3 kantor di Jakarta, Bandung dan Bogor), (3) Pegawai Pemda (5 kantor di Bogor dan Bandung), (4) Pemerhati Lingkungan (9 kantor di Bogor), (5) Pegawai Perhutani yang bekerja di lapangan (13 BKPH/RPH), (6) Pekerja hutan (8 wilayah RPH), (7) Pegawai Usaha Penyedia *Input* Produksi Kehutanan (2 kelompok tani produsen pupuk kompos), (8) Pegawai Industri Hasil Hutan (6 industri) dan (9) Masyarakat umum pedesaan (8 desa). Responden dipilih secara sengaja. PK yang pertama ditemui, memenuhi syarat yang ditentukan dan bersedia diwawancarai atau mengisi daftar pertanyaan, ditetapkan sebagai responden. Responden penelitian berjumlah 347 orang.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, pengamatan, pencatatan dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan meliputi (1) data peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat, (2) data preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi dan (3) data lain yang terkait.

E. Analisis Data

Preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi dianalisis berdasarkan jawaban responden dari 9 (sembilan) kelompok pemangku kepentingan, melalui 3 (tiga) cara berikut (Marimin, 2004).

1. Menyusun preferensi 3 (tiga) alternatif jawaban

Preferensi setiap kelompok pemangku kepentingan (PK) terhadap satu keadaan/kegiatan pengelolaan hutan, yang disampaikan dengan menyusun preferensi terhadap 3

alternatif jawaban, dianalisis dengan metode nilai tertimbang atau *scoring*, melalui langkah berikut.

- a. Menghitung jumlah jawaban preferensi 1, 2 dan 3 masing-masing untuk seluruh alternatif jawaban a, b dan c.
- b. Memberi nilai 2, 1 dan 0 masing-masing untuk alternatif jawaban preferensi 1, 2 dan 3.
- c. Menghitung jumlah nilai setiap alternatif jawaban, dengan cara mengalikan jumlah setiap alternatif jawaban dengan nilainya, dan menghitung persentasenya.
- d. Alternatif jawaban dengan persentase nilai tertinggi, kedua, dan terendah masing-masing menjadi alternatif jawaban preferensi 1, 2 dan 3 dari satu kelompok PK.
- e. Menghitung preferensi 1, 2 dan 3 untuk seluruh kelompok PK
- f. Preferensi 1 terbanyak menunjukkan preferensi pertama PK terhadap satu keadaan/kegiatan pengelolaan hutan

2. Memilih 1 dari 3 alternatif jawaban

Preferensi setiap kelompok PK terhadap satu keadaan/kegiatan pengelolaan hutan, yang ditunjukkan dengan memilih 1 dari 3 alternatif jawaban (termasuk alternatif jawaban c yang menunjukkan bahwa alternatif jawaban a dan b adalah sama-sama disukai), dianalisis dengan metode nilai tertimbang atau *scoring*, melalui tahapan berikut.

- a. Menghitung jumlah jawaban a, b dan c yang menjadi pilihan responden dari satu kelompok PK
- b. Menghitung persentase masing-masing alternatif jawaban dari satu kelompok PK, dengan cara membagi jumlah masing-masing alternatif jawaban dengan jumlah seluruh alternatif jawaban kali 100%.
- c. Alternatif jawaban dengan persentase tertinggi, kedua, dan terendah masing-

masing menjadi alternatif jawaban preferensi 1, 2 dan 3 dari satu kelompok PK.

- d. Menghitung preferensi 1, 2 dan 3 untuk seluruh kelompok PK
 - e. Preferensi 1 terbanyak menunjukkan preferensi pertama PK terhadap satu keadaan/kegiatan pengelolaan hutan
3. Menilai kemampuan pemerintah, perusahaan dan masyarakat

Kemampuan pemerintah, perusahaan atau masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan dianalisis dengan metode nilai tertimbang atau *scoring*, melalui tahapan berikut.

- a. Menghitung persentase alternatif jawaban a (memadai/optimal) dan alternatif jawaban b (tidak memadai/tidak optimal) yang menjadi pilihan responden dari masing-masing kelompok PK
- b. Kemampuan pemerintah/perusahaan/masyarakat dinilai memadai/optimal jika alternatif jawaban a dari 5 (lima) kelompok PK atau lebih adalah $> 50\%$, dan dinilai sebaliknya jika alternatif jawaban b dari 5 (lima) kelompok PK atau lebih adalah $> 50\%$

Hasil survei preferensi tersebut merupakan kumpulan beragam informasi sederhana yang berhubungan secara tidak langsung satu dengan lainnya. Untuk mengetahui preferensi pemangku kepentingan yang komprehensif maka informasi yang sederhana tersebut

digabungkan dalam beberapa kelompok dan selanjutnya dilakukan sintesis preferensi. Hasil sintesis diharapkan dapat (1) mengidentifikasi keadaan pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan, (2) mengetahui keadaan pengelolaan hutan yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan dan (3) merumuskan pola pengelolaan hutan produksi preferensi pemangku kepentingan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran KPH Bogor dan Masyarakat Sekitar Hutan

KPH Bogor merupakan KPH Pembangunan. Sebagian arealnya belum ditata, sebagian tidak produktif dan produksi kayu hanya berasal dari Kelas Perusahaan *Acacia mangium*. Areal KPH Bogor terpencar di banyak lokasi dan dikelilingi 60 (enam puluh) desa yang penduduknya berpendapatan rendah, hampir seluruh areal hutan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan sebagian di antaranya telah dirambah untuk kepentingan pertanian dan pemukiman.

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan umumnya mempunyai sumberdaya yang rendah. Hasil survei di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan berpendapatan kurang dari Rp 1 juta per KK/bulan, berpendidikan SD atau SMP dan mempunyai kebergantungan langsung yang tinggi pada hutan (Tabel 2).

Tabel 2. KPH Bogor dan masyarakat sekitar hutan
 Table 2. Forest district of Bogor and rural people live surrounding forest

Uraian (<i>Item</i>)	Luas/aksesibilitas (<i>Area/accessibility</i>)	Keterangan (<i>Remarks</i>)
A. KPH Bogor (<i>Forest district of Bogor</i>)		
1. Luas hutan produksi (<i>Area of production forest</i>)	42.698 ha	KPH Pembangunan
2. Area hutan produksi yang belum ditata (<i>Area of production forest having not been set</i>)	14.491 ha	34% hutan produksi
3. Area hutan produksi yang dirambah (<i>Enchroachment area of production forest</i>)	18.792 ha	44% hutan produksi
4. Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>)	Mudah	Jarak antar batas sisi panjang hutan maksimum 6 km.
B. Masyarakat (<i>Rural people</i>)		
1. Pendidikan (<i>Education</i>)	Umumnya SD dan SMP	
2. Pendapatan (<i>Income</i>)	< Rp 1 juta/KK/bln	
3. Pemilikan lahan (<i>Land ownership</i>)	< 0,5 ha/KK	
4. Kebergantungan pada hutan (<i>Dependency on forest</i>)	Tinggi	

Sumber (*Sources*): berbagai sumber (*various sources*)

Kondisi tersebut di atas menyebabkan KPH Bogor menghadapi masalah sosial yang beragam mulai dari pencurian kayu, kebakaran hutan sampai dengan perambahan hutan dan masalah agraria lainnya. Pada tahun 2006, kerugian akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan mencapai Rp 56 juta (Perum Perhutani KPH Bogor, 2006).

B. Preferensi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Produksi

1. Ruang lingkup pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan hutan produksi secara umum dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok: (1) pengelolaan hutan tanpa pemberdayaan (PTP) dan (2) pengelolaan hutan dengan pemberdayaan (PDP). PTP berlaku sebagai landasan pengelolaan hutan

produksi di Luar Jawa sampai dengan tahun 1990 (Departemen Kehutanan, 2006) dan berlaku di Jawa sampai dengan tahun 1970 (Perum Perhutani, 2007). Setelah itu, semua pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan pemberdayaan.

Pada PTP, perusahaan diharapkan mampu mengelola hutan secara lestari, tidak wajib memberdayakan masyarakat dan (seharusnya) membayar pajak yang tinggi namun perusahaan tetap memperoleh keuntungan normal. Pada PTP, kegiatan pemberdayaan masyarakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

PDP adalah pengelolaan hutan yang memasukkan pemberdayaan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Pada PDP, perusahaan diharapkan mampu mengelola hutan secara lestari, membayar pajak pada tingkat tertentu dan bersama dengan

pemerintah dan pemangku kepentingan terkait terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Hasil survei menunjukkan bahwa PDP lebih disukai dibanding PTP, atau PK mengharapkan bahwa pemberdayaan

masyarakat menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini, menurut PK, lebih menjamin partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan keberhasilan pengelolaan hutan (Tabel 3).

Tabel 3. Preferensi pemangku kepentingan terhadap ruang lingkup pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan

Table 3. Stakeholders' preferences on the range of forest management and rural people empowerment

Urutan preferensi (<i>Rank of preferences</i>)	Ruang lingkup pengelolaan hutan (<i>Range of forest management</i>)			Ruang lingkup pemberdayaan (<i>Range of rural people empowerment</i>)		
	Pilihan (<i>Choices</i>)			Pilihan (<i>Choices</i>)		
	DP	TP	S	Luas (<i>large</i>)	Sedang (<i>medium</i>)	Terbatas (<i>limited</i>)
Pref.1/ <i>pref.1</i> (Σ kel. PK/ Σ <i>group of stakeholders</i>)	5	0	4	6	3	0
Pref.2/ <i>pref.2</i> (Σ kel. PK/ Σ <i>group of stakeholders</i>)	4	0	5	2	5	2
Pref.3/ <i>pref.3</i> (Σ kel. PK/ Σ <i>group of stakeholders</i>)	0	9	0	1	1	7

Keterangan (*Remarks*): DP = dengan pemberdayaan (*with empowerment*); TP = tanpa pemberdayaan (*without empowerment*); S = sama (*equal*); Pref = preferensi (*preference*)

Hasil survei juga menunjukkan bahwa pemberdayaan dengan ruang lingkup luas (pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan berbagai kegiatan pedesaan) dinilai lebih baik dibanding pemberdayaan dengan ruang lingkup sedang (pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan kegiatan lain yang terkait) maupun pemberdayaan dengan ruang lingkup terbatas (pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat hanya dalam kegiatan pengelolaan hutan). Menurut PK, pemberdayaan dengan ruang lingkup luas lebih menjamin keberhasilan pengelolaan hutan, memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat pedesaan dan lebih mendorong partisipasi masyarakat mengatasi gangguan hutan.

Preferensi PK terhadap ruang lingkup pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sama dengan ruang lingkup pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat pola Pengelolaan Hutan Bersama dengan Masyarakat (PHBM). Hal ini perlu mendapat perhatian. Implementasi pemberdayaan masyarakat pola PHBM hanya dapat dilakukan secara terbatas karena sumber daya yang dimiliki perusahaan terbatas (Perum Perhutani KPH Bogor, 2006). Oleh karena itu, jika sumberdaya yang tersedia terbatas maka pemberdayaan perlu diprioritaskan pada kegiatan yang memberi kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pengelolaan hutan, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.

2. Prioritas pemberdayaan

Secara garis besar, kegiatan pemberdayaan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok: (1) pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan dan usaha lain terkait (UPT) dan (2) pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada usaha/kegiatan pedesaan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pengelolaan hutan (UPL). Hasil survei menunjukkan bahwa jika sumberdaya yang dimiliki perusahaan hanya memadai untuk melaksanakan satu dari dua kegiatan pemberdayaan (UPT atau UPL) maka pemberdayaan pada kedua kegiatan tersebut dinilai sama baiknya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di pedesaan dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan. Meskipun demikian, pemberdayaan dengan prioritas UPT sedikit lebih disukai dibanding pemberdayaan dengan fokus UPL, atau

pemberdayaan sebaiknya diprioritaskan pada UPT (Tabel 4).

Kegiatan UPT dapat dipilah menjadi dua kegiatan yaitu: (1) usaha pokok atau usaha pengelolaan hutan (UPO) dan (2) usaha penyedia *input* dan usaha pengolah *output* (UPP). Hasil survei menunjukkan bahwa jika sumberdaya yang dimiliki perusahaan hanya memadai untuk melaksanakan satu dari dua kegiatan pemberdayaan (UPO atau UPT) maka pemberdayaan pada kedua kegiatan tersebut dinilai sama baiknya dalam meningkatkan: kesempatan kerja, partisipasi masyarakat mengatasi gangguan hutan, kegiatan ekonomi pedesaan dan keberhasilan pengelolaan hutan. Meskipun demikian, pemberdayaan dengan fokus UPO sedikit lebih disukai dibanding pemberdayaan dengan fokus UPP, atau pemberdayaan sebaiknya diprioritaskan pada kegiatan UPO (Tabel 4).

Tabel 4. Prioritas pemberdayaan masyarakat pedesaan 1
 Table 4. Priority of rural people empowerment 1

Urutan preferensi (Rank of preferences)	Prioritas pemberdayaan (Priority of empowerment)					
	Pilihan (Choices)			Pilihan (Choices)		
	UPT	UPL	S	UPO	UPP	S
Pref.1/pref.1 (Σ kel. PK/ Σ group of stakeholders)	3	0	6	0	0	9
Pref.2/pref.2 (Σ kel. PK/ Σ group of stakeholders)	5	1	3	6	3	0
Pref.3/pref.3 (Σ kel. PK/ Σ group of stakeholders)	1	8	0	3	6	0

Keterangan (Remarks): UPT = usaha pokok dan usaha terkait (*main and related activities*); UPL = usaha pedesaan lain (*other activities of rural people*); UPO = usaha pokok (*main activity*); UPP = usaha penyedia *input* dan pengolah *output* (*forestry production input and forest products industries*); S = sama (*equal*); Pref = preferensi (*preference*)

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat pada usaha pokok dapat dilakukan secara periodik pada saat ada kegiatan penanaman, pemeliharaan dan penebangan atau secara berkelanjutan dengan mengelola hutan dengan sistem agroforestri/multikultur. Hasil survei

menunjukkan bahwa agroforestri sepanjang daur, kombinasi tanaman pokok dengan tanaman pertanian semusim pada awal daur dan dengan tanaman cepat tumbuh/buah-buahan pada pertengahan sampai akhir daur (ABU) lebih disukai dibanding agroforestri

sepanjang daur, kombinasi tanaman pokok dengan tanaman pertanian semusim pada awal daur dan dengan tanaman empon-empon pada pertengahan sampai akhir daur (AEM) maupun agroforestri yang dilakukan hanya pada awal daur, kombinasi tanaman pokok dengan tanaman pertanian semusim (APK). Menurut PK, ABU memberi kesempatan kerja lebih luas dan lebih berkesinambungan, menghasilkan akumulasi pendapatan untuk perusahaan lebih tinggi, lebih mendorong partisipasi masyarakat mengatasi gangguan hutan dan lebih menjamin kelestarian pengelolaan hutan dibanding AEM dan APK (Tabel 5).

Selanjutnya, kegiatan UPL dapat dipilah menjadi dua kegiatan yaitu pembangunan

sarana prasarana pedesaan (PSP) dan usaha pedesaan non kehutanan (UPN). Hasil survei menunjukkan bahwa jika sumberdaya yang tersedia hanya memadai untuk melaksanakan satu dari dua kegiatan tersebut (PSP atau UPN) maka pemberdayaan pada kedua kegiatan tersebut dinilai sama baiknya dalam meningkatkan: kesempatan kerja, partisipasi masyarakat mengatasi gangguan hutan, kegiatan ekonomi pedesaan dan keberhasilan pengelolaan hutan. Meskipun demikian, pemberdayaan dengan fokus UPN sedikit lebih disukai dibanding pemberdayaan dengan fokus PSP, atau pemberdayaan sebaiknya diprioritaskan pada kegiatan UPN (Tabel 5).

Tabel 5. Prioritas pemberdayaan masyarakat pedesaan 2
Table 5. Priority of rural people empowerment 2

Urutan preferensi (<i>Rank of preferences</i>)	Prioritas pemberdayaan (<i>Priority of empowerment</i>)					
	Pilihan (<i>choices</i>)			Pilihan (<i>choices</i>)		
	ABU	AEM	APK	PSP	UPN	S
Pref.1/pref.1 (Σ kel. PK/ Σ <i>groups of stakeholders</i>)	7	2	0	0	2	7
Pref.2/pref.2 (Σ kel. PK/ Σ <i>groups of stakeholders</i>)	2	7	0	1	6	2
Pref.3/pref.3 (Σ kel. PK/ Σ <i>groups of stakeholders</i>)	0	0	9	8	1	0

Keterangan (*Remarks*): ABU = agroforestri sepanjang daur, kombinasi tanaman pokok, tanaman pertanian dan buah-buahan (*whole rotation agroforestry, combination of wood trees, food crops and fruit trees*); AEM = agroforestri sepanjang daur, kombinasi tanaman pokok, pertanian dan empon-empon (*whole rotation of agroforestry, combination of wood trees, food and non food crops*); APK = agroforestri pada awal daur, kombinasi tanaman pokok dan tanaman pertanian (*agroforestry on early rotation, combination of wood trees and food crops*); PSP = pembangunan sarana prasarana pedesaan (*development of rural infrastructure*); UPN = usaha pedesaan non kehutanan (*non forestry activities*)

Secara keseluruhan, hasil survei tentang prioritas pemberdayaan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan secara berturut-turut diprioritaskan pada: (1) usaha pokok (UPO), (2) usaha penyedia *input* dan pengolah *output* (UPP), (3) usaha pedesaan non kehutanan (UPN) dan (4) pembangunan sarana prasarana pedesaan (PSP). Lebih jauh, usaha meningkatkan kesempatan kerja pada usaha

pokok dilakukan dengan mengelola hutan secara multikultur atau dengan sistem agroforestri sepanjang daur (ABU).

Keberhasilan pemberdayaan dengan prioritas tersebut adalah bergantung pada kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tersebut serta kemampuan pemda dan perusahaan memberdayakan masyarakat.

3. Kemampuan masyarakat pedesaan

Masyarakat pedesaan baik perorangan maupun kelompok (koperasi) perlu diberdayakan dan diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi, baik sebagai pemilik atau pengelola maupun sebagai pekerja pada: (1) kegiatan pengelolaan hutan skala kecil (< 1000 ha), skala menengah (\pm 5000 ha) dan skala besar (> 20.000 ha), (2) usaha penyedia *input* produksi (penyedia bibit, makanan, transportasi, *polibag*, pupuk, dan lain-lain) skala kecil (tenaga kerja < 20 orang), skala menengah (20 - 100 orang) dan skala besar (>

100 orang) dan (3) industri hasil hutan (penggergajian, kerajinan, mebel, dan lain-lain) skala kecil (tenaga kerja < 20 orang), skala menengah (20 - 100 orang) dan skala besar (> 100 orang).

Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan dinilai mampu berpartisipasi sebagai pengelola hutan, penyedia *input* produksi dan industri hasil hutan yang berskala kecil. Akan tetapi mereka dinilai tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk mengelola ketiga usaha tersebut yang berskala menengah dan besar (Tabel 6).

Tabel 6. Kemampuan masyarakat pedesaan sebagai pengelola dan pekerja

Table 6. The ability of rural people as a manager and a worker

Peran dan kemampuan masyarakat pedesaan (Role and the ability of rural people)	Jenis usaha (Kind of activities)								
	Penyedia <i>input</i> (Forestry production input)			Pengelolaan hutan (Forest management)			Industri hasil hutan (Forest products industries)		
	Skala usaha (scale of activity)			Skala usaha (scale of activity)			Skala usaha (scale of activity)		
	Kecil (small)	Sedang (medium)	Besar (big)	Kecil (small)	Sedang (medium)	Besar (big)	Kecil (small)	Sedang (medium)	Besar (big)
Sebagai pengelola (As a manager)									
- memadai/ <i>able</i> (? kel PK/? groups of stakeholders)	5	0	0	8	1	0	8	1	0
- tidak/ <i>not able</i> (? kel PK/? group of stakeholders)	4	9	9	1	8	9	1	8	9
Sebagai pekerja (As a worker)									
- memadai/ <i>able</i> (? kel PK/? group of stakeholders)	8	0	0	-	-	2	8	1	0
- tidak/ <i>not able</i> (? kel PK/? group of stakeholders)	1	9	9	-	-	7	1	8	9

Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan dinilai mampu menjadi pekerja pada usaha penyedia *input* produksi dan industri hasil hutan yang berskala kecil. Meskipun demikian, mereka dinilai tidak mampu menjadi pekerja pada kedua usaha tersebut yang berskala menengah dan besar, serta tidak mampu menjadi pekerja hutan (Tabel 6).

4. Peran pemerintah dan perusahaan

Secara umum, peran pemerintah daerah (pemda) dalam kegiatan pengelolaan hutan adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberdayakan masyarakat pedesaan agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Sementara itu, peran perusahaan adalah mengelola hutan, menciptakan lapangan kerja dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Hasil survei tentang peran pemda dan perusahaan disajikan pada Tabel 7, 8 dan 9. Tabel 7 menunjukkan bahwa pemda belum mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat memicu gangguan hutan. Penegakan hukum yang lemah dipandang sebagai penyebab utama yang memicu gangguan hutan, sedangkan manfaat hutan yang rendah bagi masyarakat dan tidak seimbang permintaannya dan penawaran kayu

sebagai penyebab kedua dan ketiga. Meskipun demikian, menurut PK, bentuk dukungan pemda yang paling dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pengelolaan hutan berdasarkan skala prioritasnya secara berturut-turut adalah meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat, mewujudkan penegakan hukum dan menyeimbangkan permintaan dan penawaran kayu.

Tabel 7. Peran pemda menciptakan iklim usaha yang kondusif
Table 7. The role of local government in creating conductivity of activities

Urutan preferensi (<i>Rank of preferences</i>)	Pemicu gangguan hutan (<i>Stimulus of forest disturbance</i>)			Peran Pemda (<i>Role of local government</i>)		
	Pilihan (<i>choices</i>)			Pilihan (<i>choices</i>)		
	Rendahnya manfaat hutan (<i>Lowness of forest</i>)	Lemahnya penegakan hukum (<i>Lowlaw enforcement</i>)	Suplai demand tidak seimbang (<i>Unbalance supply and demand</i>)	Meningkatkan manfaat hutan (<i>Lift upness of forest</i>)	Menegakkan hukum (<i>Law enforcement</i>)	Menyeimbangkan suplai demand (<i>Balancing supply and demand</i>)
Pref.1/pref.1 (Σ kel. PK/ Σ <i>groups of stakeholders</i>)	4	5	0	8	1	0
Pref.2/pref.2 (Σ kel. PK/ Σ <i>groups of stakeholders</i>)	5	4	0	1	7	1
Pref.3/pref.3 (Σ kel. PK/ Σ <i>groups of stakeholders</i>)	0	0	9	0	1	8

Tabel 8 menunjukkan bahwa pemda dan perusahaan dinilai mempunyai kemampuan yang memadai untuk memberdayakan masyarakat sebagai pengelola hutan, penyedia *input* produksi dan industri hasil hutan yang berskala kecil, namun tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk memberdayakan mereka sebagai pengelola usaha tersebut yang berskala menengah dan besar. Pemda dan perusahaan juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat sebagai pekerja pada usaha penyedia *input* produksi dan industri hasil hutan yang berskala kecil. Meskipun demikian, pemda dan perusahaan

dinilai tidak mampu memberdayakan mereka sebagai pekerja pada usaha yang berskala menengah dan besar, serta tidak mampu memberdayakan mereka sebagai pekerja hutan.

Lebih jauh, pemberdayaan oleh pemda dan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai pengelola dan pekerja pada tiga usaha tersebut, dinilai tidak optimal (Tabel 9). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa dukungan pemda dalam kegiatan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat memang terbatas.

Tabel 8. Kemampuan pemda dan perusahaan memberdayakan masyarakat pedesaan
Table 8. The ability of local government and firm to empower rural people

Kemampuan memberdayakan masyarakat (Ability to empower rural people)	Kegiatan pemberdayaan (Activities of empowerment)								
	Penyedia input (Forestry production input)			Pengelolaan hutan (Forest management)			Industri hasil hutan (Forest products industries)		
	Skala usaha (scale of activities)			Skala usaha (scale of activities)			Skala usaha (scale of activities)		
	Kecil (small)	Sedang (medium)	Besar (big)	Kecil (small)	Sedang (medium)	Besar (big)	Kecil (small)	Sedang (medium)	Besar (big)
Masy. sbg pengelola (Rural as a manager)									
- memadai/ able (Σ kel PK/ Σ groups of stakeholders)	8	1	0	8	2	1	8	3	0
- tidak/ not able (Σ kel PK/ Σ group of stakeholders)	1	8	9	1	7	8	1	6	9
Masy. sbg pekerja (Rural as a worker)									
- memadai/ able (Σ kel PK/ Σ group of stakeholders)	8	4	0	-	-	4	8	4	1
- tidak/ not able (Σ kel PK/ Σ group of stakeholders)	1	5	9	-	-	5	1	5	8

Tabel 9. Tingkat pemberdayaan oleh pemda dan perusahaan
Table 9. The level of empowerment by local government and firm

Peran masyarakat (Role of rural people)	Tingkat pemberdayaan oleh pemda dan perusahaan (Level of empowerment by local government and firm)					
	Penyedia input (Forestry production input)		Pengelolaan hutan (Forest management)		Industri hasil hutan (Forest products industries)	
	Pilihan (Choices)		Pilihan (Choices)		Pilihan (Choices)	
	Optimal (Optimum)	Tidak optimal (Not optimum)	Optimal (Optimum)	Tidak optimal (Not optimum)	Optimal (Optimum)	Tidak optimal (Not optimum)
Masy. sbg pengelola/ rural as a manager (Σ kel PK/ Σ groups of stakeholders)	0	9	0	9	0	9
Masy. sbg pekerja/ rural as a worker (Σ kel PK/ Σ groups of stakeholders)	0	9	0	9	0	9

Hasil wawancara dengan pegawai: (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, (2) Kantor Koperasi dan UKM, dan (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bogor, serta pengecekan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2007 (Pemerintah Kabupaten Bogor, 2006) menunjukkan bahwa instansi pemerintah tersebut tidak memiliki program dan kegiatan yang secara khusus ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan

sekitar hutan. Hasil wawancara dan pengecekan terhadap kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor juga menunjukkan hal serupa. Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Kehutanan tidak ada yang terkait secara langsung dengan kegiatan pengelolaan hutan produksi (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 2005).

Secara garis besar hasil survei tentang peran masyarakat pedesaan, pemda dan perusahaan tersebut menunjukkan beberapa

hal berikut. *Pertama*, jika diberdayakan masyarakat pedesaan mampu menjadi pengelola hutan, penyedia *input* produksi dan industri hasil hutan yang berskala kecil, serta mampu menjadi pekerja pada usaha penyedia *input* dan industri hasil hutan yang berskala kecil. Dalam realisasinya, partisipasi mereka dalam berbagai usaha pedesaan tersebut masih terbatas karena kurang diberdayakan. *Kedua*, masyarakat pedesaan dinilai tidak mampu menjadi pekerja hutan. Pemda dan perusahaan juga dinilai tidak mampu memberdayakannya. Hal ini seolah bertentangan dengan hasil survei yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan mampu mengelola hutan produksi skala kecil (hutan rakyat).

Pendapat PK tersebut mungkin dipengaruhi oleh kenyataan bahwa hutan produksi hanya menyediakan kesempatan kerja yang terbatas. Di KPH Bogor, sebagai contoh, pengelolaan hutan produksi yang dilaksanakan pada tahun 2006 hanya melibatkan masyarakat pedesaan dari 13 desa yang berbatasan dengan hutan produksi, atau tidak melibatkan masyarakat pedesaan dari 47 desa lainnya yang berbatasan dengan hutan produksi. Kegiatan penanaman, pemeliharaan, penjarangan dan pemanenan pada tahun 2006 memang hanya dilaksanakan pada areal yang berbatasan dengan 13 desa tersebut (Perum Perhutani KPH Bogor, 2006).

Jika penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan adalah terbatasnya kesempatan kerja di dalam kawasan hutan maka kesempatan kerja tersebut perlu ditingkatkan. Peningkatan kesempatan kerja di dalam kawasan hutan yang sesuai dengan preferensi PK adalah merubah pengelolaan hutan dari monokultur untuk kayu menjadi multikultur/agroforestri untuk kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Perubahan pola pengelolaan hutan ini meningkatkan manfaat hutan bagi masyarakat dan sekaligus partisipasi mereka mengatasi gangguan hutan.

5. Pola pengelolaan hutan preferensi pemangku kepentingan (PHPPK)

Hasil survei preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi menunjukkan bahwa pola pengelolaan hutan yang sesuai dengan preferensi PK (PHPPK) memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini berarti bahwa kegiatan pemberdayaan, seperti halnya kegiatan pengelolaan hutan lainnya, harus dilaksanakan karena keberhasilannya menentukan keberhasilan pengelolaan hutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat oleh pemda dan perusahaan diprioritaskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berturut-turut pada (1) usaha pokok (UPO), (2) usaha penyedia *input* dan pengolah *output* (UPP), (3) usaha pedesaan non kehutanan dan (4) pembangunan sarana prasarana pedesaan.
- c. Masyarakat pedesaan menjadi mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam kegiatan pengelolaan hutan, usaha penyedia *input* dan industri hasil hutan, khususnya yang berskala kecil.
- d. Hutan produksi dikelola secara multikultur untuk kayu dan HHBK atau dengan sistem agroforestri sepanjang daur, yang menghasilkan pendapatan tahunan untuk perusahaan dan menyediakan kesempatan kerja yang luas secara berkelanjutan untuk masyarakat pedesaan.

Berdasarkan karakteristik tersebut maka dapat dirumuskan bahwa pola PHPPK adalah pola pengelolaan hutan multikultur atau agroforestri berbasis pemberdayaan masyarakat, yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan.

C. Implikasi Kebijakan

Pola pengelolaan hutan preferensi pemangku kepentingan (PHPPK) memiliki kesamaan dengan pola pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat (PHBM). Keduanya menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan dan keduanya memerlukan dukungan Pemda.

Perbedaan yang pokok adalah bahwa dalam PHBM, hutan produksi dikelola secara monokultur untuk kayu, sedangkan dalam PHPPK, hutan produksi dikelola secara multikultur/agroforestri sepanjang daur untuk kayu dan HHBK. Perbedaan ini sangat menentukan dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Tabel 10. Kesempatan kerja yang tersedia pada hutan monokultur dan multikultur
 Table 10. *Jobs opportunities available on monoculture and multiculture forests*

Jenis kegiatan (<i>Kind of activities</i>)	Kesempatan kerja selama 20 tahun (<i>Job opportunity in 20 years</i>)		
	Hutan monokultur (<i>Monoculture forest</i>)		Hutan multikultur (<i>Multiculture forest</i>)
	Kayu (<i>wood</i>)	Kayu (<i>wood</i>)	Kayu-buah (<i>wood-fruit</i>)
Penanaman (<i>planting</i>)	1 kali	1 kali	1 kali
Pemeliharaan (<i>maintenance</i>)	2 kali	2 kali	20 kali
Penjarangan (<i>tending</i>)	3 kali	3 kali	-
Pemanenan (<i>harvesting</i>)	1 kali	1 kali	16 kali
Jumlah (<i>total</i>)	7 kali	7 kali	37 kali
Jumlah tertimbang (<i>weighted total</i>)	7 kali (100%)		22 kali (314%)*

Keterangan (*Remarks*): *22 = (7 + 37) : 2; 314% = 22 : 7 X 100%

Gambaran umum manfaat hutan bagi masyarakat dalam bentuk kesempatan kerja di dalam kawasan hutan, antara hutan monokultur dan hutan multikultur disajikan pada Tabel 10. Kesempatan kerja tersebut dihitung dengan asumsi: (1) daur tebang 20 tahun, (2) luas hutan monokultur dan multikultur adalah sama, (3) hutan multikultur ditanami dua jenis pohon, yaitu pohon penghasil kayu dan pohon penghasil kayu-buah (atau HHBK lain, seperti yang tercantum dalam Permenhut 35/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu), (4) luas areal untuk pohon penghasil kayu dan pohon penghasil kayu-buah pada hutan multikultur adalah sama, (5) kesempatan kerja yang tersedia untuk setiap jenis kegiatan adalah sama dan (6) pohon buah-buahan dikelola secara

intensif dan hasilnya dipanen setiap tahun mulai tahun ke 6 (enam) sampai tahun ke 20. Dengan asumsi tersebut diperoleh gambaran bahwa kesempatan kerja yang tersedia pada hutan multikultur adalah 3 (tiga) kali kesempatan kerja yang tersedia pada hutan monokultur.

Berdasarkan gambaran tersebut maka hutan multikultur juga dapat diharapkan menumbuhkan kesempatan kerja di luar kawasan hutan, yaitu pada usaha penyedia *input* (pupuk, obat, peralatan) dan usaha paska panen (pengolahan dan pemasaran hasil), yang lebih luas dibanding hutan monokultur. Dengan demikian, pengelolaan hutan multikultur secara potensial menguntungkan pemangku kepentingan yang terlibat.

Masyarakat pedesaan memperoleh keuntungan dalam bentuk kesempatan kerja dan pendapatan yang berkesinambungan, yang akan mendorong mereka berpartisipasi dalam mengatasi gangguan hutan. Pemerintah daerah memperoleh keuntungan dari meningkatnya kesempatan kerja dan berkembangnya kegiatan ekonomi di pedesaan, yang akan meningkatkan dukungan pemerintah dalam kegiatan pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih jauh, perusahaan memperoleh keuntungan dalam bentuk meningkatnya partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Memperhatikan potensinya dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan hutan, besarnya manfaat hutan bagi masyarakat dan kesamaannya dengan pola PHBM, maka pola PHPPK perlu diimplementasikan. Keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kelayakan finansial pengelolaan hutan multikultur (kayu dan HHBK) dan dukungan kebijakan pengembangan HHBK. Kebijakan yang ada saat ini (Permenhut P.35/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; Permenhut P.36/2008 tentang Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT); dan Permenhut P.21/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan), secara implisit mendukung pengembangan HHBK melalui hutan tanaman. Namun secara eksplisit, kebijakan tersebut tidak menjelaskan apakah semua atau sebagian HHBK yang tercantum dalam Permenhut 35/2007 dapat dikembangkan melalui hutan tanaman. Penjelasan yang terkait dengan pengembangan HHBK tersebut penting mengingat hanya sebagian HHBK yang dapat diusahakan secara menguntungkan melalui hutan tanaman.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keadaan dan kegiatan pengelolaan hutan produksi yang belum sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut.
 - a. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan hutan produksi rendah.
 - b. Hutan produksi menyediakan kesempatan kerja terbatas.
 - c. Pemberdayaan masyarakat oleh pemda dan perusahaan belum optimal
2. Keadaan dan kegiatan pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut.
 - a. Masyarakat pedesaan berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan produksi.
 - b. Masyarakat pedesaan memperoleh manfaat yang memadai dan berkesinambungan dari pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengelola hutan produksi secara multikultur/agroforestri yang hasilnya dapat dipungut setiap tahun.
 - c. Masyarakat pedesaan memperoleh manfaat yang memadai dan berkesinambungan dari kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi. Hal ini dapat diwujudkan dengan menempatkan mereka sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam pengelolaan hutan rakyat, usaha penyedia *input* dan industri hasil hutan.
3. Pola pengelolaan hutan produksi yang sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan adalah pola pengelolaan hutan produksi multikultur/agroforestri berbasis pemberdayaan masyarakat yang

menempatkan mereka sebagai mitra kerja dan mitra usaha perusahaan dalam usaha/ kegiatan pengelolaan hutan, penyedia *input* produksi dan industri hasil hutan.

B. Saran

Perlu disusun kebijakan yang memungkinkan tanaman HHBK yang bernilai ekonomi tinggi dapat diusahakan melalui hutan tanaman agar hutan produksi dapat dikelola sesuai dengan preferensi pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Birkland, Thomas A. 2001. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Model of Public Policy Making*. M.E. Sharpe, Armonk, New York.
- Brinkerhorff, D.W. and L.Crosby. 2002. *Managing Policy Reform: Concepts and Tool for Decision Makers in Developing Countries and Transition Countries*. Kumarian Press, Inc. USA.
- Departemen Kehutanan. 2006. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan 1993-2006*. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 2007. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu*.
- Departemen Kehutanan. 2008. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau Dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT)*.
- Departemen Kehutanan. 2009. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2009 Tentang Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan*.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor. 2005. *Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 2005-2009*.
- Jesus, F. 2002. *P.A.C.T A Pro-active Conciliation Tool: Analysing Stakeholders Inter-Relations*. CGRT Centre Work Towards Reducing Poverty Through Enhancing Sustainable Agriculture in Asia and Pacific Region.
- Marimin. 2004. *Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk (Tehnik dan Aplikasi)*. Grasindo, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Bogor. 2006. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2007*.
- Perum Perhutani. 2001. *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Dengan Masyarakat (PHBM)*. Direksi Perum Perhutani, Jakarta.
- Perum Perhutani. 2007. *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Dengan Masyarakat Plus (PHBM Plus)*. Direksi Perum Perhutani, Jakarta.
- Perum Perhutani KPH Bogor, 2006. *Laporan Tahunan Perum Perhutani KPH Bogor Tahun 2006*.
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Terjemahan Halida Dewi Sartika. Erlangga, Jakarta
- Setyarso, A. 1995. *Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari Pada Tingkat Satuan Operasional*. Dalam Suhendang E. et al. (Penyunting). *Pengelolaan Hutan Lestari di Indonesia: Konsep, Permasalahan dan Strategi Menuju Era Ekolabel*. Prosiding Simposium Penerapan

- Ekolabel di Hutan Produksi, Jakarta 10-12 Agustus 1995.
- Simon, H. 1994. The Technical and Social Needs of Social Forestry. *Dalam* Prosiding Sosial Forestry and Sustainable Forest Management. Perum Perhutani, Jakarta.
- Simon, H. 1994. The Technical and Social Needs of Social Forestry. *Dalam* Prosiding Sosial Forestry and Sustainable Forest Management. Perum Perhutani, Jakarta.
- Suharto, E. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.